

PENGARUH OPINI AUDIT, TEMUAN AUDIT, DAN KERUGIAN DAERAH TERHADAP TINGKAT KORUPSI DI JAWA TENGAH

Amalia Rahmah Pertiwi, Haryanto¹

Departemen Akuntansi Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro
Jl.Prof. Soedharto SH Tembalang, Semarang 50239, Phone: +622476486851

ABSTRACT

This study aims to provide additional empirical evidence on the effect of audit opinion, audit findings and regional losses regional losses due to corruption in Central Java. Hypothesis testing was carried out using multiple linear regression analysis. The data collection method used purposive sampling method sourced from BPK related to IHPS and LHP LKPD, BPS related to the realization of local government expenditures, and the High Court related to data on prosecution of criminal acts of corruption The results obtained in this study indicate that audit opinions, audit findings, and regional losses have no effect on the level of corruption in both districts and cities in Central Java Province.

Keywords: Government Performance, Audit Opinion, Audit Findings, Losses, Corruption

PENDAHULUAN

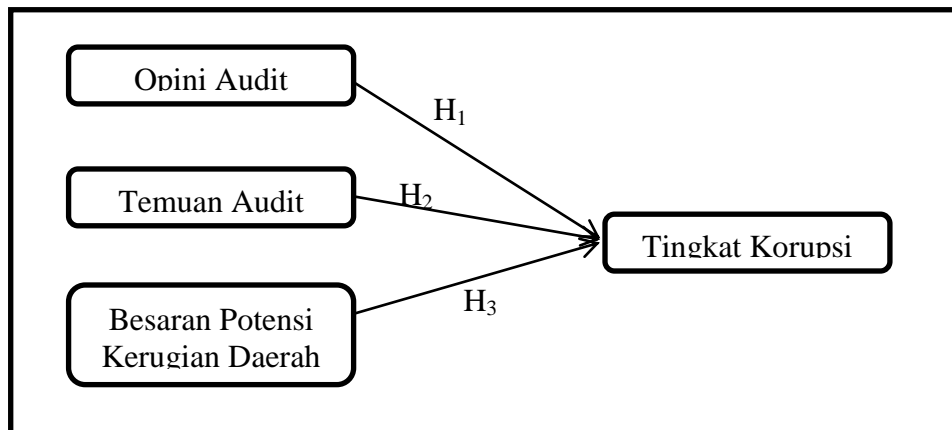
CPI menyatakan bahwa, persepsi korupsi umumnya terdiri dari aktivitas tidak sah, yang direncanakan secara tertutup dan hanya dapat terungkap melalui kasus, penyelidikan atau penuntutan (2020). Dalam tabel grafik yang diberikan oleh ICW, kasus korupsi pada tahun 2019 menurun sebanyak 271 kasus dari yang sebelumnya terdapat 454 kasus, dan selama 2016-2019 kasus korupsi mengalami peningkatan kerugian negara yaitu dari Rp 1,450 triliun menjadi Rp 8,405 triliun (2020).

Menurut laporan ICW, mengenai kinerja penindakan kasus korupsi oleh Kejaksaan, telah mengalami penurunan yang signifikan sejak tahun 2018, terlebih aktor yang ditangkap oleh kejaksaan rata-rata bersumber dari jabatan pelaksana dan sedikitnya yang bersumber dari jabatan strategis (2020). Dalam kasus korupsi yang ada, tak luput melibatkan peran pemerintah di dalamnya. Menurut Kristiansen *et al.* (2009), peningkatan akuntabilitas dan transparansi idealnya dapat memperbaiki sistem pemerintahan, tetapi dokumen negara tetap rahasia, dalam kemauan berpolitik untuk melaksanakan UU KIP, dan pemerintahan di berbagai tingkatan menunjukkan minat yang sedikit serta kemampuan dalam penganggaran yang berorientasi pada kinerja. Bultek pada SPKN Nomor 1 tahun 2012 menyatakan jika laporan keuangan suatu entitas bukan menampilkan yang diwajibkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), maka dari itu auditor wajib mengemukakan opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) atau Tidak Wajar (TW) (Iqbal, 2014). Hasil tindak lanjut dari pemeriksaan biasa dilakukan secara diskusi dalam sidang parlemen pada tingkat pusat maupun daerah, dan instansi pemerintah yang melaksanakan perbaikan berdasarkan rekomendasi yang diberikan pemeriksa (Dwiputrianti, 2008). Hasil pemeriksaan atas LKPD seharusnya dapat dijadikan sebagai acuan dalam penilaian kinerja pemerintah baik pusat maupun daerah, namun realitanya opini WTP yang diberikan belum lengkap dikarenakan adanya akun-akun pada laporan keuangan yang ditampilkan tak sama dengan SAP maupun tak dilengkapi dengan bukti yang memadai.

Pada penelitian terdahulu yang mengulas keterkaitan opini audit BPK semisal Hikam (2020) yang mengatakan bahwa opini audit BPK mampu mencerminkan tingkat kecurangan pemerintah daerah. Terlebih di Provinsi Jawa Tengah memiliki 13 korupsi terbesar di tahun 2019 yang mengalami kerugian negara sebesar Rp 17,1 miliar (ICW, 2020). Namun menurut Kurniawati (2021) bahwa opini audit tidak mempengaruhi tingkat korupsi walaupun dapat berguna sebagai dasar pengurangan dalam penyalahgunaan keuangan dan pendeteksian gejala korupsi sehingga terciptalah tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui pengaruh opini audit BPK, temuan audit dan besaran potensi kerugian daerah terhadap tingkat korupsi di Jawa Tengah pada tahun 2016-2019.

KERANGKA PEMIKIRAN TEORITIS DAN PERUMUSAN HIPOTESIS

Teori keagenan menurut Jensen dan Meckling (1976) adalah teori yang berkaitan dengan prinsipal dan agen pada suatu perusahaan maupun organisasi (Ghozali, 2020). Diperlukan adanya kerjasama antara agen dan prinsipal untuk menjalankan informasi yang ada. Jika prinsipal tidak dapat mengawasi kinerja agen dengan semestinya maupun agen tidak bekerja dengan cakap (baik), maka akan timbul *Moral Hazard* (asimetri informasi). Masalah ini timbul pada saat agen maupun prinsipal kurang berusaha dalam hubungan pekerjaan, tidak selaras dalam kontrak dan diibaratkan seperti bentuk oportunistis yang meliputi *free-riding*, *shirking*, dan *perk-consumption* (Chrisman *et al.*, 2004). Kerangka pemikiran penelitian ini digambarkan sebagai berikut:



Opini Audit dengan Tingkat Korupsi

Laporan keuangan dirancang oleh instansi setempat yang dipergunakan sebagai media komunikasi kepada pengguna laporan keuangan, baik investor, kreditor, masyarakat, maupun lembaga yang mengawasi. LKPD diperiksa berdasarkan nilai tingkat kewajarannya dengan menunjukkan memberikan opini sesuai dengan laporan yang disajikan. Opini yang diberikan memiliki 4 ragam, yaitu WTP, WDP, TW, dan TMP (L.I., 2020). Dengan adanya WTP yang dibubuhkan oleh BPK, pengguna laporan keuangan pemerintah tidak perlu khawatir dengan pengambilan keputusan karena telah diungkapkan secara wajar dan terlepas dari salah saji material.

Pada penelitian lebih dahulu yang dikerjakan oleh Budiman dan Amyar (2021), menyatakan bahwa opini audit tak memberikan pengaruh atas tingkat korupsi. Dikatakan bahwa apabila terdapat temuan selama proses pemeriksaan pengadaan barang dan jasa, namun dalam pelaporan keuangan dilaporkan sesuai dengan SAP, laporan keuangan tetap memperoleh opini WTP. Oleh sebab itu, hipotesis yang disusun sebagai berikut:

H₁: Opini audit berpengaruh terhadap tingkat korupsi

Temuan Audit dengan Tingkat Korupsi

Temuan audit diperoleh ketika auditor menjalankan pengecekan terhadap laporan keuangan pemda. Menurut Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN) BPK Nomor 1 tahun 2017, temuan audit berupa pengendalian internal, kepatuhan berkaitan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan temuan penyelewengan serta ketidakpatuhan yang selanjutnya ditampilkan menurut elemen temuan dari jenis, kondisi, sebab dan akibat (Syahrir dan Suryani, 2020). Permasalahan umum yang sering terjadi pada SPI yaitu dari pejabat yang berkewajiban belum maksimal dalam melaksanakan peremajaan mengenai pemahaman atas akuntansi dan pelaporan kepada eksekutor tugas hingga pengemban yang belum menyusun pedoman saat menjalankan tugas dan wewenangnya (BPK, 2020a). Sedangkan permasalahan umum dalam ketidakpatuhan berkaitan ketentuan peraturan perundang-undangan yaitu dari KPA hingga pengelola BMD yang kurang optimum dalam melaksanakan pemantauan dan mengendalikan terlaksananya pekerjaan.

Menurut penelitian Furqan *et al.* (2020) mengatakan bahwa terdapat pengaruh dalam temuan audit dengan kecakapan dari laporan keuangan dan kualitas pelayanan publik, baik yang

menggunakan indeks jumlah temuan audit maupun jumlah temuan audit SPI dan kepatuhan berkaitan peraturan perundang-undangan. Dengan meningkatnya temuan audit, maka SPI belum dijalankan secara efektif dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan di pemerintah daerah pun terbilang rendah, akhirnya menimbulkan adanya praktik korupsi yang besar. Peneliti menyimpulkan bahwa dengan banyaknya temuan dan kerugian negara yang ada, maka hipotesis peneliti sebagai berikut:

H2: Temuan Audit berpengaruh terhadap tingkat korupsi

Besaran Potensi Kerugian Daerah dengan Tingkat Korupsi

Dalam peraturan BPK Nomor 1 tahun 2007 didefinisikan mengenai kerugian negara yaitu menurunnya kekayaan negara/wilayah yang berwujud dana, sekuritas, dan barang yang nyata dan jelas kadarnya diakibatkan dari perbuatan melanggar hukum, baik yang direncanakan maupun abai dapat menyebabkan risiko munculnya kerugian di masa mendatang (Wijaya, 2015). Seumpama terjadi risiko terjadinya ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang tertanda kecurangan, pengusut patut memvariasikan tata cara untuk memahami terjadinya kecurangan tersebut, serta dampaknya yang dilanjutkan pemeriksa/auditor harus mengungkapkannya pada laporan hasil temuan audit (BPK, 2017a).

Studi kasus yang dikerjakan oleh Kurniawati dan Pratama (2021) menyampaikan bahwa deteksi penyimpangan berpengaruh positif dengan tingkat korupsi. Temuan audit yang dilaporkan oleh pemeriksa kepada pemerintah provinsi untuk diperbaiki tidak ditanggapi sehingga SPI makin melemah dan pengalihan dana oleh pejabat pemerintah mengakibatkan kerugian keuangan negara. Peneliti menyimpulkan bahwa hipotesis yang diambil yaitu:

H3: Besaran potensi kerugian daerah berpengaruh terhadap tingkat korupsi

METODE PENELITIAN

Variabel Penelitian

Penelitian ini menggunakan variabel dependen yang diukur dengan tingkat korupsi, variabel independen yang digunakan yaitu opini audit BPK, temuan audit, dan besaran potensi kerugian daerah.

Tabel 1
Variabel dan Pengukuran

<i>Variabel</i>	<i>Pengukuran</i>
Ukuran Pemerintahan	Data pengeluaran pemerintah daerah dan Produk Domestik Bruto
Tingkat Korupsi	Jumlah tindak pidana korupsi yang tertangani oleh Kejaksaan Tinggi RI yang berada di Provinsi Jawa Tengah
Opini Audit	Variabel <i>dummy</i> dengan poin 1 untuk opini WTP dan poin 0 untuk opini selain WTP
Temuan Audit	Jumlah temuan audit
Besaran Potensi Kerugian Daerah	Jumlah nominal kerugian

Sumber: Output IBM SPSS 26, data sekunder yang diolah 2021

Penentuan Sampel

Penelitian ini menggunakan laporan keuangan lembaga/instansi pemerintah yang terdapat di Provinsi Jawa Tengah. Penelitian ini menerapkan metode *purposive sampling* dengan sampel berupa:

1. Opini audit BPK dan temuan audit sejak tahun 2016 hingga 2019 terkait laporan keuangan pemerintah daerah di Provinsi Jawa Tengah.
2. Pemerintah daerah yang melaporkan laporan hasil pemeriksaan baik kabupaten maupun kota sejak tahun 2016 hingga 2019.
3. Realisasi anggaran pemerintah daerah di Provinsi Jawa Tengah sejak tahun 2016 hingga 2019

Metode Analisis

Metode analisis yang digunakan yaitu analisis regresi berganda untuk pengujian terhadap hipotesis karena variabel yang diuji mencantumkan lebih dari dua variabel seperti X_1 , X_2 , dan Y (Khasanah, 2021). Dalam menganalisis data yang telah diperoleh, persamaan yang akan diterapkan pada pengkajian ini yaitu sebagai berikut:

$$\text{CORRUPT} = \alpha + \beta_1\text{AO} + \beta_2\text{AF} + \beta_3\text{AFL} + \beta_4\text{GOVSIZE} + \varepsilon$$

Informasi:

CORRUPT	: Tingkat Korupsi (<i>Corruption level</i>)
α	: Konstanta
$\beta_1, \beta_2, \beta_3, \beta_4, \beta_5$: Koefisien regresi
AO	: Opini audit
AF	: Temuan audit
AFL	: Besaran potensi kerugian daerah
GOVSIZE	: Ukuran pemerintah
ε	: Errors

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Deskripsi Objek Penelitian

Peneliti menggunakan kriteria dalam data yang diamati untuk diolah, yaitu lembaga/instansi pemerintah baik kota maupun kabupaten sebanyak 35 yang berada di Provinsi Jawa Tengah sejak tahun 2016 hingga 2019. Dengan demikian sampel yang digunakan untuk diolah sebanyak 140 sampel penelitian.

Tabel 2 Sampel Penelitian Periode 2016-2019

<i>Kriteria Sampel</i>	<i>Jumlah Lembaga Pemerintah</i>
Jumlah lembaga pemerintah di Provinsi Jawa Tengah x 4 tahun	140
Data <i>outliner</i>	(14)
Tidak ada kasus korupsi selama tahun 2016-2019	
Jumlah sampel akhir penelitian	126

Sumber: Output IBM SPSS 26, data sekunder yang diolah 2021

Berdasarkan tabel 2, terdapat 14 data yang berasal dari Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah. Pada data tersebut menunjukkan adanya kota maupun kabupaten yang tidak memiliki kasus korupsi pada tahun yang dimaksud yang kemudian disebut sebagai data *outliner*.

Statistik Deskriptif

Pada hasil yang diperoleh dari statistik deskriptif sebagaimana tertera di tabel 3, bahwa telah disajikan sebagai berikut:

Tabel 3 Statistik Deskriptif

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
AO	126	,00	1,00	,9206	,27139
AF	126	,4771	1,3617	1,069003	,1778065
AFL	126	8,7367	11,5590	10,022752	,5654340
GOVSIZE	126	,0001	,1595	,091911	,0327728
CORRUPT	126	,0088	,2628	,036200	,0347788
Valid N (<i>listwise</i>)	126				

Sumber: Output IBM SPSS 26, data sekunder yang diolah 2021

Hasil Uji Asumsi Klasik

Pada uji normalitas yang diolah memakai uji *one sample kolmogorov-smirnov* memaparkan nilai signifikansi lebih dari 0,05, seperti yang tersajikan pada tabel. Jika nilai signifikasinya 0,200 lebih dari 0,05 yang artinya data tersebut memperoleh nilai residual yang berdistribusi normal (tabel 4). Pada pengujian multikolineritas dilakukan untuk mengetahui adanya interkorelasi antar variabel atau tidak, yaitu menggunakan metode *tolerance* dan *VIF (Variance Inflation Factor)*. Pada tabel tertera bahwa nilai *tolerance* mendekati 1 dan pada nilai *VIF* berada antara 1 hingga 10, yang berarti dapat dinyatakan model regresi linier berganda ini tak mengakibatkan multikolineritas. Begitu pula hasil dari uji heteroskedastisitas yang mempergunakan uji *glejser*, jika nilai signifikasinya lebih besar dari 0,05 maka disimpulkan penelitian yang dilakukan tak ditemukan permasalahan heteroskedastisitas.

Tabel 4 Hasil Uji One-Sample Kolmogorov-Smirnov

Unstandardized Residual	
N	126
Kolmogrov-Smirnov Z	0,59
Asymp. Sig. (2-tailed)	,200

Sumber: Output IBM SPSS 26, data sekunder yang diolah 2021

Tabel 5 Hasil Uji Multikolinearitas

Model	Tolerance	VIF
(Constant)		
AO	,884	1,131
AF	,872	1,147
AFL	,821	1,218
GOVSIZE	,967	1,034

Sumber: Output IBM SPSS 26, data sekunder yang diolah 2021

Tabel 6 Hasil Uji Heterokedastisitas

Variabel	T	Sig
AO	,985	,327
AF	1,637	,104
AFL	2,038	,044
GOVSIZE	-,006	,995

Sumber: Output IBM SPSS 26, data sekunder yang diolah 2021

Hasil Uji Hipotesis

Uji statistik F berguna memahami pengaruh variabel independen yang berada pada model regresi linear berganda secara bersamaan berkenaan variabel dependen yang diteskan pada tingkat signifikansi 0,05. Diketahui bahwa nilai $F_{hitung} > F_{tabel}$ yaitu sebesar $2,687 > 2,42$ dan nilai signifikansi $0,034 < \alpha = 0,05$. Maka dari itu, variabel opini audit, temuan audit, besaran potensi kerugian daerah dan ukuran pemerintah berpengaruh secara simultan berhubungan tingkat kasus korupsi di Jawa Tengah. Sedangkan dalam pengujian uji t, ditampilkan untuk mengamati keterlibatan antara variabel independen dengan variabel dependen yang diukur melalui tingkat signifikansi 0,05. Hasil dari analisis uji t disajikan pada tabel 7:

Tabel 7 Hasil Uji Hipotesis

Model	B	t	Sig
(Constant)	-,111	-1,785	,077
AO	-,001	-,051	,960
AF	,030	1,660	,100
AFL	,012	1,974	,050

GOVSIZE	-,022	-,239	,812
---------	-------	-------	------

Sumber: Output IBM SPSS 26, data sekunder yang diolah 2021

Dari hasil yang diperoleh pada tabel di atas, maka persamaan regresi menjadi:

$$\text{CORRUPT} = -0,111 - 0,001\text{AO} + 0,030\text{AF} + 0,12\text{AFL} - 0,022\text{GOVSIZE} + \varepsilon$$

Pengaruh Opini Audit terhadap Tingkat Korupsi

Hasil yang diperoleh dari analisis data pada tabel 7 menunjukkan variabel opini audit memiliki nilai $t_{\text{hitung}} (-0,051) < t_{\text{tabel}} 1,979$ dan nilai signifikansinya $0,960 > 0,05$. Dapat diartikan hipotesis pertama tidak mempengaruhi tingkat korupsi, dalam hal ini hipotesis ditolak. Hasil yang diteliti ini sama halnya dengan penelitian milik Budiman dan Amyar (2021) yang menyampaikan bahwa opini audit tak memberikan pengaruh atas tingkat korupsi. Atas dasar hasil pengolahan data dari tabel 7 membuktikan bahwa walaupun audit BPK telah memberikan opini wajar tanpa pengecualian, belum tentu menjamin lembaga/instansi pemerintahan terbebas dari tindakan korupsi.

Hal ini didukung oleh studi kasus yang dikerjakan Khelil & Amara (2020) yang menjelaskan dengan adanya hubungan politik dapat meningkatkan kemungkinan perolehan opini audit wajar tanpa pengecualian, berhubungan dengan dana audit yang relatif tinggi dan adanya penundaan pelaksanaan audit yang lama. Juga terdapat dukungan lain dari kasus korupsi yang tinggi pada tahun-tahun yang diteliti seperti korupsi oleh kader partai politik, suap pajak, korupsi oleh kepala daerah, maupun kasus korupsi yang dilakukan oleh anggota lembaga pemerintahan.

Pengaruh Temuan Audit terhadap Tingkat Korupsi

Hasil yang diperoleh dari analisis data pada tabel 7 menunjukkan variabel temuan audit mempunyai nilai $t_{\text{hitung}} 1,660 < t_{\text{tabel}} 1,979$ dan nilai signifikansinya $0,100 > 0,05$. Dapat diartikan bahwa hipotesis kedua tidak mempengaruhi tingkat korupsi, pada perihal ini hipotesis ditolak. Hasil yang diteliti ini sama halnya dengan penelitian yang diteliti oleh Syahrir dan Suryani (2020) bahwa temuan audit tidak berpengaruh terhadap tingkat korupsi pada pemerintah daerah di Indonesia. Sejalannya penelitian ini dikarenakan walaupun terdapat banyak temuan audit yang ada belum tentu kasus korupsi yang dilakukan banyak juga.

Temuan diperoleh berdasarkan dari pelaporan keuangan yang diperiksa setelah laporan keuangan jadi dan maksimal diserahkan kepada BPK 3 bulan sesudah tahun penganggaran berakhir (BPK, 2020b). namun sering kali ditemukan adanya rekening BLUD yang belum jelas rinciannya, laporan pertanggungjawaban bendahara pengeluaran SKPD yang tidak sesuai dengan kondisinya, maupun laporan yang terlambat atau belum disampaikan hingga batas maksimum menyampaikan tahun anggaran yang dimaksud.

Pengaruh Besaran Potensi Kerugian Daerah terhadap Tingkat Korupsi

Hasil yang diperoleh dari analisis data pada tabel 7 menunjukkan variabel besaran potensi kerugian daerah memiliki nilai $t_{\text{hitung}} 1,974 < t_{\text{tabel}} 1,979$ dan nilai signifikansinya $0,051 > 0,05$. Dapat diartikan hipotesis ketiga tidak memiliki pengaruh terhadap tingkat korupsi, dalam perihal ini, hipotesis ditolak. Hasil yang diteliti ini sejalan dengan penelitian milik Rini dan Damiyanti (2017) bahwa temuan audit yang berupa materil dalam keuangan pemerintah daerah belum tentu menyebabkan kerugian daerah karena masih bersifat potensi kerugian daerah. Jika pemerintah daerah dapat menggantikan potensi kerugian yang ada, maka dapat meminimalisirkan adanya korupsi di instansi pemerintah terkait.

Selama dilakukannya penelitian pada kali ini, sering ditemukan penyebab terjadinya penyalahgunaan keuangan daerah yang mengakibatkan potensi maupun telah terjadi kerugian daerah, yaitu emborosan dana yang digunakan pada hal yang tidak sesuai dengan rencana anggaran, realisasi APBD yang tidak tepat sasaran, adanya kelebihan maupun kekurangan pembayaran, denda atas keterlambatan penyeteroran dana ke kas daerah, hilangnya potensi PAD karena terdapat pihak ketiga yang mengambil, aset pemerintah yang tidak bisa dilacak keberadaannya; LPJ dana hibah yang belum tersampaikan, dan banyaknya bukti yang tidak sah berasal dari partai politik.

Hasil Uji Variabel Kontrol

Pengukuran kinerja keuangan pemerintah daerah menggunakan total belanja pemerintah daerah berdasarkan realisasi pada tahun anggaran yang dimaksud dengan dibagi total PDRB pada harga konstan. Perolehan dari analisis data pada tabel 7 menunjukkan variabel ukuran pemerintah memiliki nilai $t_{hitung} (-0,239) < t_{tabel} 1,979$ dengan nilai signifikansi $0,812 > 0,05$. Selanjutnya diartikan sebagai ukuran pemerintahan tidak berpengaruh kepada tingkat korupsi. Hasil yang diteliti sama halnya dengan riset milik Lewis & Hendrawan (2019) yang menyatakan bahwa terdapat penyalahgunaan anggaran dengan dibuktikan hasil audit yang buruk dan peningkatan belanja pada sektor infrakstruktur yang rawan korupsi dan studi kasus yang diteliti oleh Suyatna (2020) bahwa kepala daerah yang mempraktikkan tindak pidana korupsi masih tergolong tinggi dikarenakan keuangan yang ada di daerah berasal pada pembentukan anggaran daerah, pintu cukai dan retribusi yang disetor, pemasokan barang dan jasa, belanja subsidi untuk masyarakat, serta belanja kedinasan.

KESIMPULAN

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa opini audit tidak berpengaruh terhadap tingkat korupsi, temuan audit tidak berpengaruh terhadap tingkat korupsi, dan bahwa besaran potensi kerugian daerah tidak berpengaruh terhadap tingkat korupsi. Namun penelitian ini memiliki keterbatasan seperti hanya berdasarkan 1 (satu) wilayah provinsi dan menggunakan jangka waktu pelaporan 4 tahun sehingga hasil yang diperoleh memungkinkan adanya perbedaan apabila dibandingkan dengan wilayah provinsi lainnya, serta penggunaan variabel bebas untuk pengaruh tingkat korupsi hanya diwakili oleh 3 (tiga) variabel yang pada umumnya digunakan oleh peneliti. Peneliti selanjutnya dapat menambah aspek-aspek lainnya untuk mengembangkan variabel independen sebagai pengaruh terhadap tingkat korupsi karena hasil koefisien determinan atau *adjusted R square*, hasil yang diperoleh senilai 51% yang berarti masih terdapat banyak faktor yang mempengaruhi tingkat korupsi selain variabel bebas yang digunakan pada penelitian ini.

REFERENSI

- BPK. 2017. "BPK Terima Konsultasi Dari Pansus Hak Angket DPR Tentang KPK." <https://www.bpk.go.id/news/bpk-terima-konsultasi-dari-pansus-hak-angket-dpr-tentang-kpk>.
- . 2020a. "JENIS PEMERIKSAAN BPK." 2020. <https://www.bpk.go.id/news/jenis-pemeriksaan-bpk>.
- BPK, Badan Pemeriksa Keuangan. 2020b. "Ikhtisar Hasil Pemeriksaan BPK Semester I."
- Budiman, Muhamad Agung, and Firdaus Amyar. 2021. "The Effect of Audit Opinions, Implementation of Audit Recommendations, and Findings of State Losses on Corruption Levels in the Ministries and Institutions of the Republic of Indonesia." *Jurnal Tata Kelola Dan Akuntabilitas Keuangan Negara* 7 (1): 113–29. <https://doi.org/10.28986/jtaken.v7i1.471>.
- Chrisman, James J, Jess H Chua, and Reginald a Litz. 2004. "Comparing the Agency Costs of Family and Non-Family Firms: Conceptual Issues and Exploratory Evidence," 335–55.
- Dwiputrianti, Septiana. 2008. "EFEKTITAS LAPORAN HASIL TEMUAN PEMERIKSAAN DALAM MEWUJUDKAN REFORMASI TRANSPARANSI FISKAL DAN AKUNTABILITAS SEKTOR PUBLIK (2001-2008) DI INDONESIA." *Jurnal Ilmu Administrasi* 5 (4): 397–415.
- Furqan, Andi Chairil, Ratna Wardhani, Dwi Martani, and Dyah Setyaningrum. 2020. "The Effect of Audit Findings and Audit Recommendation Follow-up on the Financial Report and Public Service Quality in Indonesia." *International Journal of Public Sector Management* 33 (5): 535–59. <https://doi.org/10.1108/IJPSM-06-2019-0173>.
- Ghozali, Imam. 2020. *25 TEORI BESAR (GRANDY THEORY) ILMU MANAJEMEN, AKUNTANSI DAN BISNIS*. Semarang, Indonesia: YOGA PRATAMA.
- Hikam, Saeful, Yunieta Anny Nainggolan, and Muhammad Rizkarmen. 2020. "Audit Opinion and Fraud in Local Government: Case of Indonesia." *BISNIS & BIROKRASI: Jurnal Ilmu Administrasi Dan Organisasi* 27 (3). <https://doi.org/10.20476/jbb.v27i3.12108>.
- ICW. 2020. "Kasus Korupsi Tahun 2019." *Indonesian Corruption Watch*. https://antikorupsi.org/sites/default/files/200215tren_penindakan_kasus_korupsi_tahun_2019_final_2_.pdf.
- Iqbal, Mohammad. 2014. "Apakah Kecukupan Pengungkapan LKPD Dipertimbangkan Dalam Perumusan Opini Audit BPK? (Studi Kasus Di Indonesia)." *Accounting and Business Information Systems Journal* 2 (4): 1–45.
- Jensen, M.C., and W.H. Meckling. 1976. "Theory of the Firm: Managerial Bahvior, Agency Costs and Ownership Structure." *Journal of Financial Economics*, no. 3: 306–60.

- Khasanah, Uswatun. 2021. *Analisis Regresi*. Edited by Budi Asyhari. Kota Yogyakarta: UAD PRESS.
- Khelil, Imen, and Ines Amara. 2020. "Political Connections , Political Corruption and Auditing : A Literature Review." <https://doi.org/10.1108/JFC-12-2020-0257>.
- Kristiansen, Stein, Agus Dwiyanto, Agus Pramusinto, and Erwan Agus Putranto. 2009. "Public Sector Reforms and Financial Transparency: Experiences from Indonesian Districts." *ISEAS - Yusof Ishak Institute* 31 (1): 64–87. <https://doi.org/10.1355/cs31-1c>.
- Kurniawati, Anggreni Dian, and Yohanes Mario Pratama. 2021. "The Role of Government Auditing in Controlling the Level of Corruption in Indonesia." *Jurnal Akuntansi & Auditing Indonesia* 25 (1): 54–64. <https://doi.org/10.20885/jaai.vol25.iss1.art6>.
- L.I. 2020. "RAGAM OPINI BPK." 2020. <https://www.bpk.go.id/news/ragam-opini-bpk>.
- Lewis, Blane D, and Adrianus Hendrawan. 2019. "The Impact of Majority Coalitions on Local Government Spending , Service Delivery , and Corruption in Indonesia." *European Journal of Political Economy* 58 (October 2018): 178–91. <https://doi.org/10.1016/j.ejpoleco.2018.11.002>.
- Rini, Rini, and Liska Damiati. 2017. "Analisis Hasil Audit Pemerintahan Dan Tingkat Korupsi Pemerintahan Provinsi Di Indonesia." *Jurnal Dinamika Akuntansi Dan Bisnis* 4 (1): 73–90. <https://doi.org/10.24815/jdab.v4i1.4933>.
- Suyatna. 2020. "Criminal Act Policy Evaluation Corruption in Indonesian" 22 (3): 325–33. <https://doi.org/10.24198/sosiohumaniora.v22i3.25047>.
- Syahrir, Riri Safira, and Elly Suryani. 2020. "Pengaruh Opini Audit Dan Temuan Audit Terhadap Tingkat Korupsi (Studi Pada Pemerintah Daerah Di Indonesia Tahun 2017)." *Journal Accounting and Finance* 4 (1): 20–28.
- TI. 2020. "Global Corruption Barometer 10th Edition – 2020." 2020. <https://www.transparency.org/en/gcb/asia/asia-2020>.
- Wijaya, RM Arief Atmaja, and Agung Nur Probahudono. 2015. "Analisis Audit BPK RI Terkait Kelemahan SPI , Temuan Ketidapatuhan Dan Kerugian Negara." *Journal Antikorupsi* 1 (1): 81–110.